

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
TRANSFER KE DAERAH, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PADA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
2019-2023**

**Penelitian Skripsi  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

***Meilinda Rahmawati***

**NIM : 31402300143**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2024**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
TRANSFER KE DAERAH, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PADA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
2019-2023**

**Penelitian Skripsi  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

***Meilinda Rahmawati***

**NIM : 31402300143**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2024**

**SKRIPSI****PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
TRANSFER KE DAERAH, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PADA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
2019-2023**

Disusun Oleh :

*Meilinda Rahmawati*

NIM : 31402300143

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian penelitian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 2024  
Pembimbing,



Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si. Ak., CA  
NIK. 211414026

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
TRANSFER KE DAERAH, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PADA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
2019-2023**


Disusun Oleh :  
***Meilinda Rahmarwati***  
NIM : 31402300143

Telah dipertahankan di depan penguji

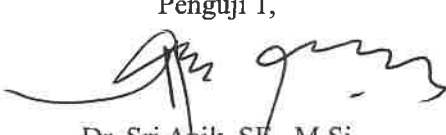
Pada tanggal 2024

**Susunan Dewan Penguji**

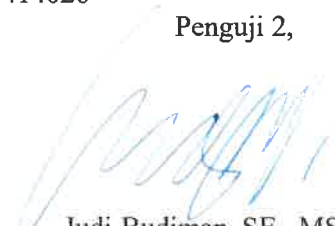
Pembimbing,

  
Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si. Ak., CA  
NIK. 211414026

Penguji 1,

  
Dr. Sri Anik, SE., M.Si  
NIK. 210493033

Penguji 2,

  
Judi Budiman, SE., MSc.Akt  
NIK 211403015

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Tanggal

2024

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi

  
Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP.

NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meilinda Rahmawati  
NIM : 31402300143  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian Skripsi saya dengan judul:

**“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023”.**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 24 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Meilinda Rahmawati  
NIM. 31402300143

## **ABSTRAK**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Ke Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Ke Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Ke Daerah, dan Belanja Modal. Kemudian, variabel dependennya adalah Kemandirian Daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota selama tahun 2019 sampai dengan 2023. sampling jenuh dengan mengambil seluruh populasi data sebagai sampel. Data sampel yang digunakan laporan realisasi APBD sejumlah 175 laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dibantu dengan Software SPSS (*Statistical Package for the Social Science*). Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah, Dana Transfer ke Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Ke Daerah, Belanja Modal, Kemandirian Daerah

## ***ABSTRACT***

*The objective of this research is to identify the influencing of Local Revenue, Transfer Funds to Regions, and Capital Expenditures on Regional Independence in the Central Java Provincial Government. Thus, the independent variables in this study are Local Revenue, Transfer Funds to Regions, and Capital Expenditures. The dependent variable is the Regional Independence. The population used in this research are all Regencies and Cities in Central Java Province, consist of 29 Regencies and 6 Cities during 2019 to 2023. The sample was taken using jenuh sampling by taking the entire data population as a sample. The sample data used were APBD realization reports totaling 175 financial reports. Then, the data was analyzed using multiple linear regression analysis methods assisted by SPSS (Statistical Package for the Social Science). The results of this study indicate that Local Revenue has a positive effect on Regional Independence, Transfer Funds to Regions has a positive effect on Regional Independence, and Capital Expenditures has a positive effect on Regional Independence.*

**Keywords:** *Local Revenue, Transfer Funds to Regions, Capital Expenditure, Regional Independence*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023”**.

Penulisan penelitian Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
4. Ibu Hani Werdi Apriyanti, SE. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
6. Ibunda Imrokhiyatun yang senantiasa memberikan kasih sayang, pengorbanan, dorongan, dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Tia Rahmawati dan Salma Rahmawati, saudara penulis yang senantiasa menemani penulis, memberikan semangat, dan kebahagiaan.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan penelitian Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2024

Penulis,



Meilinda Rahmawati  
NIM. 31402300143

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4. Tujuan Penelitian .....	10
1.5. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori <i>Stewardship</i> .....	10
2.1.2. Teori Desentralisasi Fiskal .....	11
2.2. Variabel – Variabel Penelitian.....	13
2.2.1. Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.2.2. Transfer Ke Daerah.....	14
2.2.3. Belanja Modal .....	16

2.2.4. Kemandirian Keuangan Daerah .....	17
2.3. Literasi Review Penelitian Terdahulu .....	19
2.4. Pengembangan Hipotesis .....	24
2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kemandirian Daerah 25	
2.4.2. Pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Rasio Kemandirian Daerah 26	
2.4.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Rasio Kemandirian Daerah 26	
2.5. Kerangka Penelitian .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	28
3.2. Populasi dan Sampel .....	28
3.2.1. Populasi .....	28
3.2.2. Sampel .....	29
3.3. Sumber dan Jenis Data .....	29
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	30
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	30
3.5.1. Variabel Dependen .....	30
3.5.2. Variabel Independen .....	31
3.6. Teknik Analisis Data .....	35
3.6.1. Uji Statistik Deskriptif .....	36
3.6.2. Uji Asumsi Klasik .....	36
3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda .....	37

3.6.4. Uji Goodness of Fit.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
4.1. Gambaran Objek Penelitian.....	39
4.2. Penyajian Data .....	40
4.3. Analisis Data .....	41
4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	42
4.3.2. Pengujian Asumsi Klasik .....	44
4.3.3. <i>Uji Goodness of Fit</i> .....	47
4.3.4. Pengujian Hipotesis .....	51
4.4. Pembahasan .....	53
4.4.1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah .....	53
4.4.2. Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap Rasio Kemandirian Daerah .....	55
4.4.3. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah .....	57
BAB V PENUTUP .....	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Implikasi.....	65
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	66
5.4. Agenda Penelitian Mendatang.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN .....	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	18
Tabel 2.2 Literasi Review Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	34
Tabel 4.1 Rincian Data Sampel .....	41
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas .....	45
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	45
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	47
Tabel 4.8 Hasil Uji t.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji R Square.....	50
Tabel 4.10 Hasil Regresi dan Uji t.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat rata-rata Kemandirian Daerah Tahun 2019-2023 .....	6
---	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Penyelenggara Pemerintah memberikan keleluasaan terhadap daerah terkait penyelenggaraan otonomi daerah”. Otonomi daerah merupakan wujud dari keinginan rakyat atas keterbukaan informasi publik dan kemandirian Pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan daerah. Dengan kehadiran otonomi daerah membuat pemerintah daerah lebih tertib, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan inovatif dalam mengelola anggaran serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, dan tata kelola pemerintah daerah dapat terwujud dengan baik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dianggap sangat relevan dengan kebijakan otonom karena desentralisasi sendiri memiliki arti pelimpahan kewenangan dan kekuasaan pusat kepada daerah tanpa intervensi pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan otonom, setiap Pemerintah daerah memperoleh keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan kearifan sumber daya lokal yang dimiliki dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, “Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah”. Pengelolaan sumber daya dilakukan agar Pemerintah daerah mampu

menghimpun penerimaan yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan atau belanja atas pengeluaran daerah. Penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang menggambarkan struktur rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama yang diperlukan Pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan fiskal (Nurjana & Pasaribu, 2023). Pendapatan Asli Daerah terbagi atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melihat tingkat ketergantungan fiskal atau tingkat kemandirian daerah dapat digunakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai variabel yang menggambarkan besar alokasi dana dari Pemerintah pusat/provinsi yang diberikan kepada Pemerintah daerah sebagai bentuk upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal baik vertikal maupun horizontal serta mendorong pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah.

Komponen TKD meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan istilah penyebutan dana perimbangan lebih banyak digunakan sebagai dana pusat yang dialokasikan kepada masing-masing Daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dicabut dan digantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan menambahkan komponen dana bersumber dari APBN tidak hanya dana perimbangan namun juga Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Seluruh komponen pendapatan daerah dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan publik salah satunya pembangunan fasilitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi terhadap belanja modal. Melalui belanja modal dapat dilakukan perolehan aset-aset pemerintah daerah yang mempengaruhi pembangunan daerah. Menurut Hasibuan & Tiara (2021), peningkatan alokasi anggaran belanja modal dapat mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan suatu daerah. Proporsi belanja modal yang meningkat akan menghasilkan aset yang dapat memberikan manfaat di masa depan lebih besar. Wujud dari adanya belanja modal dapat dilihat melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah. Namun, belanja daerah belum tentu dapat meningkatkan kondisi infrastruktur pada daerah secara optimal walaupun jumlah pendapatan

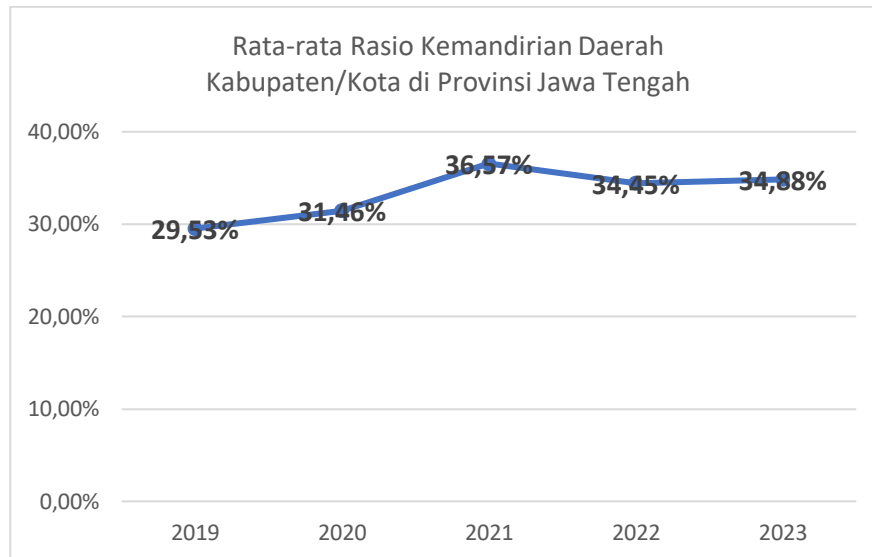
daerah meningkat (dikutip Trisnani & Isthika, 2022). Hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengalokasian belanja modal melalui pembangunan infrastruktur.

Di era otonomi sekarang, Pemerintah Daerah harus memiliki tingkat kemandirian dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan belanja. Dalam mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat seberapa besar ketergantungan daerah pada sumber pendanaan eksternal atau Pemerintah Pusat melalui perhitungan rasio kemandirian. Menurut Ardiansyah (2023), suatu daerah dapat dikatakan memiliki ketergantungan rendah terhadap bantuan luar apabila besar rasio kemandirian berkategori tinggi. Pendapat oleh Rivandi & Anggraini (2022) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dikategorikan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah ketika tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar  $> 50\%$ .

Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi alam dan sumber daya manusia yang memadai merupakan salah satu provinsi yang memiliki letak strategis. Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 35 Kabupaten/Kota yang setiap daerah memiliki keragaman sumber daya yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sumber daya inilah yang harus dimaksimalkan sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara umum masih tergolong rendah. Pada tahun 2019-2023, nilai rasio kemandirian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah rata-rata sebesar 29,53%; 31,46%; 36,57%; 34,45%; 34,88%. Tingkat kemandirian tertinggi diperoleh oleh Pemerintah Kota Semarang dengan perolehan

rata-rata mulai tahun 2019-2023 sebesar 127,29% sedangkan tingkat kemandirian terendah diduduki oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata 17,82%.

Gambar 1.1 Tingkat rata-rata Kemandirian Daerah Tahun 2019-2023 di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan (Diolah, 2024)

Berdasarkan tingkat kemandirian daerah di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah belum mandiri dalam menyelenggarakan otonomi daerah menggunakan kemampuan asli keuangan daerah. Adanya asas desentralisasi menambah total pendapatan daerah yang dengan penerimaan dana dari pemerintah pusat berupa dana transfer ke daerah. Pada tahun 2019-2023, Dana Transfer ke Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Adanya kenaikan dana transfer ke daerah ini membuat kemandirian daerah semakin turun.

Menurut penelitian terdahulu terkait Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Mahardika & Fauzan (2022), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian tersebut sependapat dengan Ardiansyah (2023) bahwa Pendapatan Asli Daerah secara berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurjana & Pasaribu (2023) menyebutkan bahwa derajat kontribusi PAD memiliki pengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2012-2021. Hasil serupa ditemukan pada penelitian Rivandi & Anggraini (2022) dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga didapatkan adanya pengaruh positif dalam pergerakan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian mengenai Dana Transfer ke Daerah pernah dilakukan oleh Ginting et al. (2019) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, terjadi perbedaan pada penelitian Machfud et al. (2021) yang menggunakan Dana Perimbangan sebagai variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap rasio kemandirian keuangan daerah dan diperoleh hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian serupa dilakukan Ardiansyah (2023) bahwa Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun hasil penelitian yang berbeda ditemukan pada. Pada Penelitian Mahardika & Fauzan (2022) yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian lain dilakukan oleh Saraswati & Nurharjanti (2021) menggunakan Dana Perimbangan sebagai variabel independen bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitian tersebut hampir serupa dilakukan oleh Yahya & Diah Widajantie (2023) yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mempengaruhi tingkat kemandirian ekonomi masing-masing daerah. Meskipun variabel independen yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), namun DAU ini juga merupakan bagian dari Dana Perimbangan.

Berkaitan dengan belanja modal yang dijadikan sebagai variabel independen terhadap kemandirian daerah sebagai variabel dependen telah dilakukan pada penelitian Nurjana & Pasaribu (2023) menyatakan bahwa rasio efisiensi belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang sama oleh Nina (2020) menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap kemandirian daerah adalah positif. Namun perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh Rivandi & Anggraini (2022) diperoleh hasil bahwa Belanja Modal terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel kemandirian keuangan daerah. Hasil serupa diperoleh oleh Lovitasari (2019), Malau (2020) dan Suwarno (2021).

Hasil penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil berbeda – berbeda sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KE DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diterima dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah sendiri. PAD ini dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri. Semakin tinggi PAD menunjukkan bahwa daerah tidak bergantung pada penerimaan dana pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerahnya. Selain PAD, Pemerintah Daerah masih memerlukan sumber lain sebagai pendapatan daerah berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Dana Transfer ke Daerah. Besarnya dana Transfer ke Daerah dibandingkan Pendapatan Asli Daerah dapat menimbulkan ketergantungan daerah sehingga mengindikasikan rendahnya kemandirian fiskal daerah tersebut.

Selain komponen Pendapatan dalam APBD, terdapat komponen belanja yang perannya sangat vital dalam penyelenggaraan daerah yaitu belanja modal. Belanja Modal menandai bentuk investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya. Belanja infrastruktur dikategorikan dalam belanja modal ini diharapkan memberikan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah sehingga menyumbang kaitan terhadap rasio kemandirian daerah. Dengan begitu, kombinasi antara PAD, pengelolaan dana transfer yang efektif, dan belanja modal yang produktif dapat meningkatkan rasio kemandirian fiskal pemerintah daerah sehingga dapat memberikan kesempatan pemerintah untuk mengelola keuangannya secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Semarang sebagai Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berhasil memperoleh tingkat kemandirian tertinggi dengan peroleh rata-rata rasio sebesar 127,29%. Tingginya tingkat kemandirian ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mampu dalam melakukan pengelolaan daerahnya utamanya pada keuangan APBD. Kemandirian ini dapat dilihat dengan menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer ke Daerah sebagai unsur penerimaan keuangan daerah serta Belanja Modal sebagai pengeluaran daerah yang memberikan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Rasio Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?
- 2) Apakah Dana Transfer ke Daerah berpengaruh terhadap Rasio Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?
- 3) Apakah pengaruh Belanja Modal berpengaruh terhadap Rasio Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;

- 2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Transfer ke Daerah terhadap Rasio Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
- 3) Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Rasio Kemandirian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

#### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai bahan rujukan atau referensi dalam menambah kajian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengenai Kemandirian Daerah yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian.

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan atau kebijakan terkait dengan penganggaran dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki pada Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

##### **1) Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan rujukan dalam menciptakan kemandirian daerah dalam optimalisasi tata kelola keuangan pemerintah.

## 2) Bagi OPD Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah serta bagi Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pengeluaran belanja terkhusus belanja modal dapat memaksimalkan produktivitas dan sehingga prestasi kerja meningkat pada Pemerintah Daerah.

## 3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, Belanja Modal, dan Kemandirian di Kota Semarang serta menambah bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sektor perekonomian di Pemerintah Kota Semarang seperti pengembangan UMKM dan pemanfaatan sarana publik milik daerah sendiri sehingga meningkatkan penerimaan daerah

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori *Stewardship***

Menurut Teori *Stewardship* merupakan kondisi suatu manajemen yang tidak memiliki motivasi untuk kepentingan pribadi melainkan lebih mengutamakan sasaran hasil utama dari kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Perilaku manajer didasarkan pada kepentingan bersama, apabila dijumpai kepentingan yang berbeda antara steward dan principal maka steward berusaha bekerja sama untuk menyesuaikan dengan mempertimbangkan alasan yang rasional. Hal ini dilakukan karena keinginan besar steward agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam pemerintahan daerah, teori *stewardship* menghubungkan antara kepentingan steward (pemerintah daerah) dan principal (masyarakat). Pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola sumber daya sehingga bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif agar tujuan yang diinginkan masyarakat dapat terwujud. Masyarakat sebagai pemilik sumber daya memiliki hak untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam menjalankan roda pemerintahan ditunjukkan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan yang digunakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Ketiga komponen APBD ini

memiliki fungsi untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai kepentingan bersama utamanya mensejahterakan masyarakat. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan yang memastikan seluruh biaya dipergunakan efektif dan efisien sesuai dengan kesepakatan bersama. Penetapan tujuan bersama dilakukan antara penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat, dalam hal ini masyarakat diperankan oleh DPRD selaku perwakilan masyarakat yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan anggaran memastikan bahwa berbagai kepentingan masyarakat terwakili dan memberikan legitimasi pada anggaran yang disusun. Setiap tahunnya antara penyelenggara pemerintah daerah dan DPRD melakukan penyusunan APBD sebagai pedoman pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal. Koordinasi kedua belah pihak sangat menentukan dalam keberhasilan daerah. Koordinasi yang baik meningkatkan mekanisme *checks and balances* yang mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan legislatif, sehingga alokasi anggaran dapat dioptimalkan untuk prioritas yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pemerintah daerah dan DPRD perlu bekerja sama untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **2.1.2. Teori Desentralisasi Fiskal**

Menurut teori desentralisasi adalah kebijakan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan pendanaan pada pelaksanaan otonomi daerah

yang dilakukan dengan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Keberadaan kebijakan fiskal berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah dan mendorong tingkat perekonomian daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Awal pelaksanaan desentralisasi fiskal pada era reformasi secara resmi pada tanggal 1 Januari 2001 dimulai dengan persetujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tahap kedua pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditandai dengan adanya perubahan dalam kebijakan keuangan negara melalui pengesahan paket Undang-Undang keuangan negara yang terdiri dari tiga regulasi di sektor keuangan negara. Dalam tahap ketiga, UU Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Teori Desentralisasi Fiskal menjelaskan bahwa pemerintah pusat melimpahkan wewenang dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik (Rante et al., 2018). Adanya desentralisasi menimbulkan ketimpangan antar daerah karena sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah berbeda. Bagi beberapa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang kecil masih bergantung pada bantuan dana dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bantuan dana ini diwujudkan melalui dana Transfer ke Daerah yang menjadi sarana pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Kondisi ketergantungan pada dana Transfer ke Daerah membuat daerah menjadi tidak mandiri sehingga berakibat pada kemandirian daerah tersebut.

Semakin besar proporsi transfer ke daerah pada pendapatan daerah, maka rasio kemandirian dari daerah tersebut semakin menurun.

Pelaksanaan desentralisasi memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran yang menjadi pelimpahannya didasarkan pada tugas dan fungsi. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam melaksanakan desentralisasi fiskal sesuai dengan prinsip *money should follow functions* (dikutip Christia & Ispriyarso, 2019). Pada kondisi sekarang pemerintah menggunakan konsep money follow program dalam rangka penyesuaian pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengarah pada efektivitas pendanaan untuk mencegah terjadinya duplikasi penganggaran. *Prinsip money follow program* memfokuskan pendanaan pemerintah berdasarkan program prioritas strategis yang menjadi tugas dan urusannya.

## **2.2. Variabel – Variabel Penelitian**

### **2.2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diterima dari hasil pengelolaan sumber daya dalam wilayahnya yang dipungut menurut peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah memiliki fungsi yang sangat penting, karena dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Ardiansyah, 2023).

Penerapan teori *Stewardship* diterapkan ketika pemimpin daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset daerah, mengembangkan potensi wisata dan industri lokal, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, daerah memiliki sumber pendanaan yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan hasil Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh pada kemandirian daerah yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan otonomi daerah secara efektif. Daerah yang mandiri akan lebih leluasa dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

### **2.2.2. Transfer Ke Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Transfer ke Daerah terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pemberian transfer modal ke daerah dilakukan untuk memperkuat proses alokasi agar lebih akurat, transparan,

dan akuntabel. Adanya pendapatan lain selain Pendapatan Asli Daerah dapat membantu kemampuan keuangan daerah yang masih relatif terbatas untuk mendanai seluruh penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Besar nilai yang diterima setiap daerah berbeda, hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda.

Kebijakan Dana Transfer ke Daerah menurut PP Nomor 37 Tahun 2023 didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Besar alokasi Dana TKD yang disalurkan ke masing-masing Pemerintah Daerah diatur pada rinci setiap bab mulai dari Bab II. Dana Bagi Hasil, Bab III. Dana Alokasi Umum, Bab IV. Dana Alokasi Khusus, Bab V. Dana Otonomi Khusus, Bab VI Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bab VII. Dana Desa. Dalam proses penyaluran TKD, Pemerintah Pusat dapat melakukan penghentian dan/ atau penundaan dengan pertimbangan berikut:

- a) terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala Daerah, kepala Desa, dan/atau aparat Desa;
- b) terdapat permasalahan administrasi;
- c) Daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
- d) pengendalian belanja APBN dan/atau APBD

Penerapan teori desentralisasi fiskal digunakan sesuai dengan tujuan pemberian dana Transfer ke Daerah yaitu melakukan pemerataan kemampuan

keuangan antar-Daerah dalam mendanai kebutuhan daerah. Namun, dengan transfer dana menimbulkan efek negatif, seperti berkurangnya motivasi daerah untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketergantungan daerah pada dana dari pemerintah pusat sehingga berakibat pada tingkat kemandirian daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila ketergantungan pada dana transfer pusat semakin berkurang. Namun, sebaliknya semakin besar ketergantungan daerah pada dana transfer pusat mengakibatkan kemandirian daerah menjadi kecil.

### **2.2.3. Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah jenis pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, Gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jembatan serta aset tetap lainnya. Belanja modal memiliki peranan strategis dalam pembangunan sebuah daerah karena penggunaan belanja modal ditujukan untuk pemenuhan pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Hal ini yang menjadikan belanja modal perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam melakukan penganggaran APBD. Belanja infrastruktur dikategorikan dalam belanja modal yang diharapkan memberikan efek multiplier

terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah berupa pajak maupun retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah inilah yang menjadi salah satu kriteria untuk mengukur kemandirian suatu daerah (Andriana, 2020).

Teori *Stewardship* menekankan pada kepercayaan dan komitmen steward (pemerintah daerah) terhadap kepentingan principal (masyarakat). Teori ini berasumsi bahwa pemerintah daerah akan bertindak demi kepentingan principal. Dalam belanja modal di pemerintah daerah dijadikan sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan aset dan infrastruktur yang dapat dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya belanja modal, diharapkan terjadi peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas hidup ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada pusat, dan meningkatkan rasio kemandirian daerah. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa belanja modal di pemerintah daerah digunakan secara efektif dan efisien Hal ini untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan belanja modal, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, adanya sistem pengawasan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mendorong tercapainya rasio kemandirian daerah.

#### **2.2.4. Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2017), kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan untuk untuk menggali potensi sumber daya sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal daerah (Malau & Simarmata, 2020). Ketika daerah telah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dapat menurunkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah provinsi/pusat. Untuk itulah, kemandirian daerah perlu menjadi pertimbangan sejalan dengan pemberian hak otonomi oleh Pemerintah Pusat (BPK RI, 2019). Adapun pola hubungan dan tingkat rasio kemandirian pada penelitian Halim (2004), diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	26 – 50	Konsultatif
Sedang	51 – 75	Partisipatif
Tinggi	76 – 100	Delegatif

Merujuk pada tabel di atas dapat dijabarkan penjelasan dari masing-masing tingkat kemandirian sebagai berikut:

- a. Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% (Instruktif) berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Apabila tingkat kemandirian 26% - 50% (Konsultatif) berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dengan demikian Pemerintah Daerah dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.

- c. Apabila tingkat kemandirian 51% - 75% (Partisipatif) berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Apabila tingkat kemandirian 76% - 100% (Delegatif) berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah

### 2.3. Literasi Review Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kemandirian daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai rujukan ataupun referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Literasi Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel dan Hasil	Hasil Penelitian
1.	Mahardika & Fauzan (2022)	Variabel 1. Independen a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Alokasi Umum c. Belanja Modal 2. Dependen Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019	a. Pendapatan asli daerah signifikan dan berpengaruh secara positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah b. Dana alokasi umum berhubungan signifikan negatif pada tingkat kemandirian keuangan daerah c. Belanja modal tidak memiliki hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah
2.	Andriana (2020)	Variabel 1. Independen a. Dana Perimbangan b. Belanja Modal	a. Dana Alokasi Umum tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah.

		2. Dependen Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	b. Dana Alokasi Khusus secara signifikan mempengaruhi kemandirian daerah c. Dana Bagi Hasil tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. d. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.
3.	Riyadi (2022)	Variabel 1. Independen a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Belanja Modal 2. Dependen Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	a. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. b. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. c. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
4.	Yahya & Diah Widajantie (2023)	Variabel 1. Independen a. Dana Alokasi Umum b. Pendapatan Asli Daerah c. Belanja Modal 2. Dependen Kemandirian Keuangan Daerah pada Kota Blitar	a. DAU tidak mempengaruhi tingkat kemandirian ekonomi masing-masing daerah b. PAD berpengaruh besar terhadap kemandirian ekonomi daerah c. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap perbedaan jenis kemandirian keuangan di berbagai daerah.
5.	Ardiansyah (2023)	Variabel 1. Independen a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan 2. Dependen Kemandirian Keuangan Daerah pada Kota Tarakan	a. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. b. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

6.	Nurjana & Pasaribu (2023)	<p>Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independen             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Derajat Kontribusi PAD</li> <li>b. Rasio Efisiensi Belanja Modal</li> </ol> </li> <li>2. Dependen             <p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Banten</p> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. derajat kontribusi PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.</li> <li>b. rasio efisiensi belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.</li> </ol>
7.	Rivandi & Anggraini (2022)	<p>Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independen             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Daerah</li> <li>b. Belanja Modal</li> </ol> </li> <li>2. Dependen             <p>Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Sumatera Barat</p> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kemandirian keuangan daerah.</li> <li>b. Belanja Modal terbukti berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel kemandirian keuangan daerah.</li> </ol>
8.	Saraswati & Nurharjanti (2021)	<p>Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independen             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak daerah</li> <li>b. Retribusi daerah</li> <li>c. Belanja Modal</li> <li>d. Dana Perimbangan</li> </ol> </li> <li>2. Dependen             <p>Kemandirian Keuangan Daerah pada 34 Provinsi di Indonesia</p> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah</li> <li>b. variabel retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> </ol>
9.	Sugiyanto & Musfirati (2021)	<p>Variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independen             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dana Alokasi Umum</li> <li>b. Dana Alokasi Khusus</li> <li>c. Dana Bagi Hasil</li> <li>d. Dana Keistimewaan</li> </ol> </li> <li>2. Dependen             <p>Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. realisasi DAU semakin besar maka akan mengakibatkan tingkat mandiri kemampuan keuangan daerah makin rendah</li> <li>b. Makin besar realisasi Dana Alokasi Khusus maka akan mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah makin tinggi.</li> <li>c. Besar kecilnya realisasi Dana Bagi Hasil tidak memiliki</li> </ol>

			<p>pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah</p> <p>d. Dana Keistimewaan DIY secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah</p>
10.	Setiawan et al. (2021)	<p>Variabel</p> <p>1. Independen</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah</p> <p>b. Dana Alokasi Umum</p> <p>c. Dana Alokasi Khusus</p> <p>2. Dependen</p> <p>Kemandirian Keuangan Daerah pada Pulau Sumatera</p>	<p>a. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Sumatera</p> <p>b. Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</p> <p>c. Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</p>
11.	Fitriyani & Suwarno (2021)	<p>Variabel</p> <p>1. Independen</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah</p> <p>b. Dana Alokasi Umum</p> <p>c. Belanja Modal</p> <p>d. Belanja Pegawai</p> <p>2. Dependen</p> <p>Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>a. Pendapatan asli bersignifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>b. Dana alokasi umum berhubungan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>c. Belanja modal berhubungan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>d. Belanja pegawai tidak memiliki hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>
12.	Machfud et al. (2021)	<p>Variabel</p> <p>1. Independen</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah</p> <p>b. Dana Perimbangan</p> <p>c. Dana Otonomi Khusus</p> <p>d. Tingkat Kemiskinan</p>	<p>a. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.</p> <p>b. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan</p>

		<p>2. Dependen Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh</p>	<p>signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.</p> <p>c. Dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.</p>
13.	Novitasari & Novitasari (2019)	<p>Variabel</p> <p>1. Independen</p> <p>a. Pajak</p> <p>b. Retribusi</p> <p>c. Dana Bagi Hasil</p> <p>d. Belanja Modal</p> <p>e. Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>2. Dependen Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur</p>	<p>a. Pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017.</p> <p>b. Retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017.</p> <p>c. DBH tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017.</p> <p>d. Belanja modal mempunyai pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.</p> <p>e. Pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur.</p>
14.	Malau & Simarmata (2020)	<p>Variabel</p> <p>1. Independen</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah</p> <p>b. Belanja Modal</p> <p>2. Dependen</p>	<p>a. PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah</p> <p>b. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah</p>

		Kemandirian Keuangan Daerah pada Sumatera Utara	
15.	Haryanto & N (2019)	Variabel 1. Independen a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Alokasi Umum c. Belanja Modal 2. Dependen Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	a. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. b. Dana Alokasi Umum tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. c. Dana Alokasi Khusus secara signifikan mempengaruhi kemandirian daerah d. Dana Bagi Hasil tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. e. Belanja Modal tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah.
16.	Ginting et al. (2019)	Variabel 1. Independen Dana Perimbangan 2. Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
17.	Ariani & Putri (2016)	Variabel 1. Independen a. Belanja Modal b. Dana Alokasi Umum 2. Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	a. Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah b. Dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### 2.4. Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

#### **2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan utama diterima daerah dari pengelolaan potensi daerah seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah, dan lain sebagainya. Merujuk pada teori *Stewardship*, pemerintah daerah melakukan kesepakatan bersama dalam proses penyusunan anggaran dengan DPRD sebagai perwakilan masyarakat guna pendanaan kegiatan pemerintahan daerah. Pendanaan ini bersumber pada pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah salah satunya Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil pengelolaan sumber daya. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dihimpun, maka semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan dan pembangunannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah diukur melalui rasio kemandirian daerah, yang dapat dilihat melalui proporsi PAD terhadap total dana transfer yang diberikan ke daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai kebutuhan dan pembangunannya sehingga dapat memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian Mahardika & Fauzan (2022), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Novitasari & Novitasari (2019), Haryanto & N (2019), Malau & Simarmata (2020), Rivandi & Anggraini (2022) dan Ardiansyah (2023), Nurjana & Pasaribu (2023).

**H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

#### **2.4.2. Pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

Transfer ke Daerah adalah dana bersumber dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke masing-masing daerah untuk membantu keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melihat pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Rasio Kemandirian digunakan penerapan teori desentralisasi fiskal sesuai dengan tujuan pemberian dana Transfer ke Daerah yaitu melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah dalam mendanai kebutuhan daerah. Namun, dengan transfer dana menimbulkan efek negatif seperti berkurangnya motivasi daerah untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Dengan keberadaan transfer ke daerah yang terlalu besar dapat menyebabkan ketergantungan daerah pada transfer pusat. Hal ini dapat mengurangi motivasi daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan sendiri sehingga mempengaruhi kemandirian daerah tersebut. Semakin besar proporsi transfer ke daerah pada pendapatan daerah, maka rasio kemandirian dari daerah tersebut semakin menurun.

Dalam penelitian Ardiansyah (2023) bahwa Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil serupa ditemukan penelitian oleh Haryanto & N (2019), Machfud et al. (2021), dan Mahardika & Fauzan (2022).

**H<sub>2</sub> : Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

#### **2.4.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

Belanja Modal merupakan salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Komponen belanja ini dapat menggambarkan kondisi infrastruktur pada daerah. Pada teori *Stewardship* berasumsi bahwa

pemerintah daerah akan bertindak demi kepentingan principal. Dalam belanja modal di pemerintah daerah dijadikan sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan aset dan infrastruktur yang dapat dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum. Belanja modal memiliki hubungan yang kuat dengan rasio kemandirian daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan infrastruktur. Aset tetap ini diharapkan dapat memberikan efek multiplier terhadap produktivitas dan efisiensi sektor ekonomi daerah, sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Andriana 2019 menyatakan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap kemandirian daerah adalah positif. Hasil serupa ditemukan penelitian oleh Ariani & Putri (2016), Riyadi (2022), dan Nurjana & Pasaribu (2023).

**H<sub>3</sub> : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

## **2.5. Kerangka Penelitian**

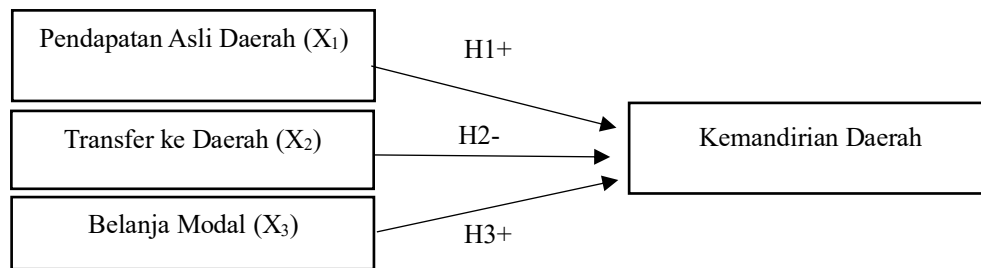
Model kerangka penelitian menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Belanja Modal sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yaitu Kemandirian Daerah.

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah

H<sub>2</sub> : Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap Rasio Kemandirian Daerah

H<sub>3</sub> : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah

Adapun kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Sugiyono (2017: 6), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kausalitas. Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antar variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain (dikutip oleh Ardiansyah, 2023). Penelitian kuantitatif menyelidiki hubungan antara variabel dengan objek yang diteliti lebih bersifat kausal, oleh karena itu dalam penelitian terdapat variabel independen (sebab) dan variabel dependen (akibat). Dari variabel-variabel tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1. Populasi**

Populasi merupakan sekumpulan data sampel yang menggambarkan secara umum karakteristik yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Setiap Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD selama tahun 2019-2023 pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **3.2.2. Sampel**

Sampel penelitian adalah perwakilan dari suatu populasi yang dipilih sebagai objek penelitian untuk diolah dan diambil sebagai kesimpulan hasil penelitiannya. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik sampling jenuh yang mengambil seluruh data populasi. Penggunaan sampel jenuh dipilih sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan gambaran representatif dari seluruh populasi. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 29 Kabupaten dan 6 Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023. Adapun data laporan realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

- a) Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.
- b) Data Realisasi Penerimaan Transfer ke Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.
- c) Data Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.

### **3.3. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi keuangan pemerintah daerah yang telah dihimpun situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang akan diteliti dalam penelitian ini diperoleh melalui publikasi data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat dan teori serta data-data dari dinas terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang diperlukan adalah data realisasi rasio keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Belanja Modal pada tahun 2019-2023.

### 3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.5.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada variabel lain dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kemandirian Daerah. Menurut Yahya & Diah Widajantie (2023), Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan penerimaan pajak dan pungutan yang dipungut di daerah. Untuk melihat sebuah kemandirian daerah dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah. Perhitungan rasio kemandirian didasarkan pada perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Menurut Nurjana & Pasaribu (2023), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{transfer provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

### **3.5.2. Variabel Independen**

#### **3.5.2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah merupakan adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan teori *Stewardship* diterapkan ketika pemimpin daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya sendiri. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, daerah memiliki sumber pendanaan yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan hasil Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh pada kemandirian daerah yang tinggi. Menurut Mahardika & Fauzan (2022), Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### **3.5.2.2. Transfer ke Daerah**

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, Transfer ke Daerah merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penerapan teori desentralisasi fiskal digunakan sesuai dengan

tujuan pemberian dana Transfer ke Daerah yaitu melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah dalam mendanai kebutuhan daerah. Namun, dengan transfer dana menimbulkan efek negatif, seperti berkurangnya motivasi daerah untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketergantungan daerah pada dana dari pemerintah pusat sehingga berakibat pada tingkat kemandirian daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila ketergantungan pada dana transfer pusat semakin berkurang. Namun, sebaliknya semakin besar ketergantungan daerah pada dana transfer pusat mengakibatkan kemandirian daerah menjadi kecil. Menurut Minarsih (2015), Dana Transfer ke Daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Dana Perimbangan} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### **3.5.2.3. Belanja Modal**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 62 Tahun 2023, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Dalam belanja modal ini terbagi atas beberapa jenis belanja seperti:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Lainnya

Dalam belanja modal di pemerintah daerah dijadikan sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan aset dan infrastruktur yang dapat dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal sesuai dengan teori *Stewardship* yang menekankan pada kepercayaan dan komitmen steward (pemerintah daerah) terhadap kepentingan principal (masyarakat). Seiring dengan meningkatnya belanja modal, diharapkan terjadi peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas hidup ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada pusat, dan meningkatkan rasio kemandirian daerah. Menurut Ernawati & Raharjo (2017), Belanja Modal dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definis Konsep	Definisi Operasional	Sumber
1.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Mahardika & Fauzan (2022)
2.	Transfer ke Daerah	Transfer ke Daerah merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	$\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Minarsih (2015)
3.	Belanja Modal	Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Ernawati & Raharjo (2017)

No	Variabel	Definis Konsep	Definisi Operasional	Sumber
4.	Kemandirian Daerah	Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan penerimaan pajak dan pungutan yang dipungut di daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transf pusat} + \text{tranf prov} + \text{pinjaman}} \times 100\%$	Nurjana & Pasaribu (2023)

### 3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dengan menggunakan metode analisis data berupa analisis kuantitatif yang melakukan analisis perhitungan terhadap angka-angka dan perbandingan. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (dikutip oleh Ardhini, 2011). Dalam penelitian ini, ketiga komponen APBD sebagai variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, transfer ke daerah, dan belanja modal dikaitkan adanya hubungan terhadap rasio kemandirian daerah sebagai variabel dependen yang diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Berikut adalah langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier.

### **3.6.1. Uji Statistik Deskriptif**

Pengujian statistik deskriptif merupakan metode statistik yang bertujuan memberikan gambaran mengenai karakteristik suatu data. Dalam pengujian statistik deskriptif dapat diperoleh data mulai dari mean, median, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dari data sampel.

### **3.6.2. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik digunakan metode pengujian sebagai langkah awal sebelum dilakukan pengujian regresi berganda. Tujuan dari uji ini adalah memastikan bahwa data terdistribusi secara normal dan dapat menjadi BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator), sehingga model regresi dalam data tersebut tidak mengalami masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

#### **3.6.2.1. Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian Kolmogorov-Smirnov dikatakan signifikansi ketika nilai signifikansi di atas 5%.

#### **3.6.2.2. Uji Multikolinieritas**

Tujuan dilakukan pengujian multikolinieritas adalah memastikan apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk menjelaskan pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat

nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Data dianggap bebas dari multikolinieritas jika memenuhi kriteria berikut: nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ .

### **3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Namun jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah apabila dalam uji normalitas tidak terdapat heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melakukan uji Glejser. Apabila probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

### **3.6.2.4. Uji Autokorelasi**

Pengujian ini memiliki tujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Runs Test. Kualitas model regresi dianggap baik jika tidak ada korelasi antara residual dari pengamatan berurutan. Jika antar residual menunjukkan korelasi yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa residual bersifat acak.

### **3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda**

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen, yaitu pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Belanja Modal terhadap Rasio Kemandirian Daerah. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan Software SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) dan Microsoft Office Excel. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Rasio Kemandirian Daerah
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1$	= Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah
$\beta_2$	= Koefisien Regresi Dana Transfer ke Daerah
$\beta_3$	= Koefisien Regresi Belanja Modal
X1	= Pendapatan Asli Daerah
X2	= Dana Transfer ke Daerah
X3	= Belanja Modal
e	= error term

#### 3.6.4. Uji Goodness of Fit

Uji goodness of fit atau kecocokan model adalah uji yang digunakan untuk menjelaskan dalam model regresi seberapa besar variasi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas (Basuki dan Prawoto, 2017). Pengujian goodness of fit atau kecocokan model dapat dilakukan dengan menggunakan nilai R-squared ( $R^2$ ) atau Koefisien Determinasi. Selain itu suatu tes goodness-of-fit dapat menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov (Nuryadi et al., 2017).

##### 3.6.4.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin

baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, sedangkan apabila Koefisien determinasi mendekati satu maka variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### **3.6.4.2. Uji F**

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan  $F < 0.05$  maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2016):

- Jika nilai signifikan  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

- Jika nilai signifikan  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  Artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

#### **3.6.4.3.Uji t**

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi/parsial. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan adalah

- a. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal itu menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Objek Penelitian**

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan letak geografis yang strategis di tengah Pulau Jawa. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 3,25 juta hektar dan dihuni oleh lebih dari 37 juta penduduk, menjadikannya salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Secara geografis, Jawa Tengah terletak pada 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur. Letak Pulau Jawa berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Menurut Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2021) Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan.

Pada tahun 2019 sampai dengan 2023, tingkat kemandirian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah secara umum masih tergolong rendah. Tingkat kemandirian daerah dapat dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil pengelolaan sumber daya secara sendiri akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhannya sendiri. Kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat dikatakan sebagai kemandirian daerah. Kemandirian daerah diukur melalui rasio kemandirian daerah, yang dapat dilihat melalui proporsi PAD terhadap total dana transfer yang diberikan ke daerah.

Bentuk ketergantungan Pemerintah Daerah diwujudkan masih adanya sumber pendapatan lain dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pemerintahan daerah berupa Dana Transfer ke Daerah. Selain komponen Pendapatan dalam APBD, terdapat komponen belanja yang perannya sangat vital dalam penyelenggaraan daerah yaitu belanja modal. Belanja Modal menandai bentuk investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya. Belanja infrastruktur dikategorikan dalam belanja modal ini diharapkan memberikan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Kombinasi antara Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan dana transfer yang efektif, dan belanja modal yang produktif dapat meningkatkan rasio kemandirian fiskal pemerintah daerah.

#### **4.2. Penyajian Data**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota selama tahun 2019 sampai dengan 2023. Pengambilan tahun penelitian tersebut didasarkan pada tingkat kemandirian pada 5 (lima) tahun tersebut masih tergolong rendah dan mempertimbangkan laporan keuangan yang sudah audited sehingga menjadikan laporan keuangan lima tahun terakhir sebagai kondisi yang masih relevan yang dapat diambil kesimpulan atas kondisi tingkat kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Metode pengambilan sampel yang digunakan merupakan sampling jenuh dengan mengambil seluruh populasi data sebagai sampel. Pengumpulan data variabel independen dan dependen diperoleh melalui publikasi data Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

Teknis pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode sampling jenuh yang mengambil seluruh data populasi. Penggunaan sampel jenuh dipilih sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan gambaran representatif dari seluruh populasi. Data yang digunakan merupakan laporan realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 4.1 Rincian Data Sampel

Keterangan	Jumlah
Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 (35 Laporan x 5 tahun)	175 laporan

### 4.3. Analisis Data

Penelitian ini dengan menggunakan metode analisis data berupa analisis kuantitatif yang melakukan analisis perhitungan terhadap angka-angka dan perbandingan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dibantu dengan Software SPSS (*Statistical Package for the Social Science*). Dalam melakukan analisis data, langkah awal yaitu melakukan statistik deskriptif untuk memperoleh hasil mean, median, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dari data sampel. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis regresi linier berganda dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan data telah terdistribusi secara normal dan dapat menjadi BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Setelah data terdistribusi normal, dilakukan pengujian *goodness of fit* untuk menjelaskan seberapa besar hubungan variasi variabel terikat dengan menggunakan variabel

bebas dalam model regresi. Uji *Goodness of fit* ini terdiri atas Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ), Uji Signifikansi t, dan Uji Simultan F.

#### 4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang bertujuan menggambarkan data sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini statistik deskriptif memberi gambaran keterangan dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah, Belanja Modal, dan Tingkat Kemandirian Daerah. Hasil statistik deskriptif setiap variabel dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKD (Y)	175	0.16	1.46	0.3344	0.18836
PAD (X1)	175	0.10	0.53	0.1959	0.07341
TKD (X2)	175	0.36	0.78	0.6081	0.05151
BM (X3)	175	0.05	0.27	0.1351	0.04136

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan Tabel 4.2 maka hasil statistik deskriptif yaitu N merupakan jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 175 data, data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan nilai terendah (*minimum*) adalah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 sebesar 0,16 sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 1,46. Nilai rata-rata (*mean*) untuk Rasio Kemandirian Daerah sebesar 0,3344 dengan standar deviasi yang telah dikonversi, menunjukkan rata-rata sebesar 0,18836.

Hal ini menunjukkan nilai rata-rata rasio kemandirian daerah yang sebesar 0,3344 berarti kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tergolong rendah. Hal ini merujuk pada kriteria level kemandirian keuangan daerah yang dilakukan oleh Halim (2004).

- 2) Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai rendah (*minimum*) adalah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 sebesar 0,10 sedangkan dengan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 0,53 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,1959. Hal tersebut menggambarkan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masih dikategorikan kurang sesuai kriteria penilaian derajat desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991), Simpangan baku (*standard deviation*) untuk Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,07341. Pada saat nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi maka dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah sudah terdistribusi dengan baik
- 3) Variabel Transfer ke Daerah menunjukkan nilai rendah (*minimum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 0,36 sedangkan dengan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kabupaten Demak pada tahun 2021 sebesar 0,78 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Transfer ke Daerah sebesar 0,6081. Hal tersebut menggambarkan komponen pendapatan daerah sebagian besar berasal dari dana transfer yang dialokasikan pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan sangat tinggi. Hal ini merujuk pada kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah yang dilakukan oleh Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (2010). Simpangan baku (*standard deviation*) untuk Transfer ke Daerah adalah sebesar 0,05151. Pada saat nilai rata-

rata lebih besar dari standar deviasi maka dapat diartikan bahwa variabel Transfer ke Daerah sudah terdistribusi dengan baik.

- 4) Variabel Belanja Modal dengan nilai rendah (*minimum*) adalah Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sebesar 0,05 sedangkan dengan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Magelang pada tahun 2019 sebesar 0,27 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Belanja Modal sebesar 0,1351. Hal tersebut menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan porsi belanja daerah untuk pembiayaan investasi dengan bentuk belanja modal dengan bobot sekitar 5-20% dari total belanja daerah (Mahmudi, 2010). Simpangan baku (*standard deviation*) untuk Belanja Modal adalah sebesar 0,04136. Pada saat nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi maka dapat diartikan bahwa variabel Belanja Modal sudah terdistribusi dengan baik.

#### **4.3.2. Pengujian Asumsi Klasik**

Pengujian terhadap asumsi klasik yang dilakukan meliputi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Tujuan dari uji ini adalah memastikan bahwa data terdistribusi secara normal sebelum dilakukan pengujian regresi berganda dan data dapat dikatakan BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*).

##### **4.3.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas penelitian ini menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual (*disturbance*) dalam model regresi terdistribusi secara normal. Kriteria pengujian *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat apabila nilai *Asymp. Sign (2-tailed)* lebih besar

dari 0,05 maka data berdistribusi normal, namun apabila nilai Asymp. Sign (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

Test Statistic	Asymp. Sig (2-tailed)	Syarat	Keterangan
0,066	0,062	>0,05	Data terdistribusi normal

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* diketahui bahwa residual (*disturbance*) dalam model regresi terdistribusi secara normal. Hal tersebut didukung dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,066 dan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,062 di atas nilai signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian, hasil *Kolmogorov-Smirnov* dapat dinyatakan seluruh data berdistribusi normal.

#### 4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Data dianggap bebas dari multikolinearitas jika memenuhi kriteria berikut: nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Syarat	VIF	Syarat	Keterangan
PAD (X1)	0.552	>0,1	1.812	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
TKD (X2)	0.599	>0,1	1.669	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
BM (X3)	0.900	>0,1	1.111	<10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Dari hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melakukan uji Glejser. Apabila probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Syarat	Keterangan
PAD (X1)	0,833	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
TKD (X2)	0,817	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
BM (X3)	0,472	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.3.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan melalui Runs Test uji.

Data dianggap bebas dari autokorelasi jika memenuhi kriteria nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

<b>Asymp. Sig (2-tailed)</b>	<b>Syarat</b>	<b>Keterangan</b>
0,495	0,05	Tidak terjadi gejala autokorelasi

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *runs test*, diperoleh hasil bahwa nilai asymp. sig (*2-tailed*) adalah 0,495 yang berarti lebih dari 0,05 ( $0,495 > 0,05$ ). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

### 4.3.3. Uji Goodness of Fit

#### 4.3.3.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F dan sig. hitung nilainya lebih kecil dari pada F tabel dan sig. lebih kecil dari 0,05 sehingga pada kondisi ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 10.7 Hasil Uji F

<b>F hitung</b>	<b>F tabel</b>	<b>Sig</b>	<b>Syarat</b>	<b>Keterangan</b>
1.357,587	2,66	0,001	<0,05	Secara simultan berpengaruh

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Hasil pengujian data di tabel menunjukkan bahwa nilai F yang diperoleh sebesar 1.357,587 sementara F tabel adalah 2,66 yang berarti F hitung lebih besar daripada F tabel ( $1.357,587 > 2,66$ ). Selain itu, nilai signifikansi 0,001 yang lebih

kecil daripada nilai signifikansi yang disyaratkan yakni 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap rasio kemandirian daerah.

#### 4.3.3.2. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) untuk belanja modal, intergovernmental revenue, leverage, size, pendapatan asli daerah. Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). Sedangkan jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Tabel 11.8 Hasil Uji t

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients B</i>	Sig	Syarat	Keterangan
PAD (X1)	1.919	0.001	<0,05	H1 diterima dan berpengaruh positif
TKD (X2)	-1.120	0.001	<0,05	H2 diterima dan berpengaruh negatif
BM (X3)	0.171	0.022	<0,05	H3 diterima dan berpengaruh positif

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan tabel hubungan yang terjadi diantara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

#### 1) **Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah.**

Dalam hasil analisis regresi bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memperoleh nilai  $t\text{-hitung}$  36,157 lebih besar dari  $t\text{-tabel}$  signifikansi 5% (1,974)

sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* sebesar 1,919 menunjukkan arah positif dan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah adalah variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap rasio Kemandirian Daerah dibandingkan dengan variabel lain dalam model ini, sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap rasio kemandirian daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**, yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian daerah.

2) **Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

Variabel Transfer ke Daerah menunjukkan negatif dengan nilai t-hitung sebesar 15,435 lebih kecil dari t-tabel signifikansi 5% (-1,974) sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* sebesar -1.120 menunjukkan arah negatif, sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan variabel Transfer ke Daerah berpengaruh terhadap rasio kemandirian daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima**, yaitu Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap rasio kemandirian daerah.

3) **Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

Variabel Belanja Modal mempunyai nilai t-hitung 2,318 lebih besar dari t-tabel signifikansi 5% (1,974) sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* sebesar 0,171 menunjukkan arah positif, sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,022 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang

menunjukkan variabel Belanja Modal berpengaruh terhadap rasio kemandirian daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **H<sub>3</sub> diterima**, yaitu Belanja Modal berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian daerah.

#### 4.3.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi dapat kita lihat dari nilai adjusted R<sup>2</sup> pada model summary pada hasil analisis regresi linier berganda dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 12.9 Hasil Uji *R Square*

R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,980	0,960	0,959

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan hasil Hasil uji regresi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,959 maka rasio kemandirian daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, Belanja Modal sebesar 95,90% dan sisanya sebesar 4,10% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

#### 4.3.3.4. Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 4.7 di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,617 + 1,919X_1 - 1,121X_2 + 0,171X_3 + e$$

Rumus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 0,617 menunjukkan bahwa variabel rasio Pendapatan Asli Daerah, rasio Transfer ke Daerah, dan rasio Belanja Modal jika nilainya 0 maka rasio kemandirian daerah sebesar 0,617.

- b. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 1,919 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka rasio kemandirian daerah akan meningkat sebesar 1,919% dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- c. Nilai koefisien Transfer ke Daerah (X2) sebesar 1,121 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap Transfer ke Daerah sebesar 1% maka rasio kemandirian daerah akan menurun sebesar 1,121% dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- d. Nilai koefisien Belanja Modal (X3) sebesar 0,171 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap Belanja Modal sebesar 1% maka rasio kemandirian daerah akan meningkat sebesar 171% dengan asumsi variabel yang lain konstan.

#### **4.3.4. Pengujian Hipotesis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

- H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah
- H2 : Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap Rasio Kemandirian Daerah
- H3 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah

Hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 13.10 Hasil Regresi dan Uji t

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients B</i>	t hitung	t tabel	Sig	Syarat	Keterangan
PAD (X1)	1.919	36.192	1,974	0.001	<0,05	H1 diterima dan berpengaruh positif
TKD (X2)	-1.120	-15.443	1,974	0.001	<0,05	H2 diterima dan berpengaruh negatif
BM (X3)	0.171	2.318	1,974	0.022	<0,05	H3 diterima dan berpengaruh positif

Sumber: Data Sekunder yang diolah di SPSS

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam hasil analisis regresi bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memperoleh nilai t-hitung 36,157 lebih besar dari t-tabel signifikansi 5% (1,974) sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* sebesar 1,919 menunjukkan arah positif dan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah adalah variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap rasio Kemandirian Daerah dibandingkan dengan variabel lain dalam model ini, sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap rasio kemandirian daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**, yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian daerah.
- b. Variabel Transfer ke Daerah menunjukkan negatif dengan nilai t-hitung sebesar 15,435 lebih kecil dari t-tabel signifikansi 5% (-1,974) sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* sebesar -1.120 menunjukkan arah negatif, sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,001

lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan variabel Transfer ke Daerah berpengaruh terhadap rasio kemandirian daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **H<sub>2</sub> diterima**, yaitu Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap rasio kemandirian daerah.

- c. Variabel Belanja Modal mempunyai nilai t-hitung 2,318 lebih besar dari t-tabel signifikansi 5% (1,974) sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* sebesar 0,171 menunjukkan arah positif, sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,022 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan variabel Belanja Modal berpengaruh terhadap rasio kemandirian daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **H<sub>3</sub> diterima**, yaitu Belanja Modal berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian daerah.

#### 4.4. Pembahasan

##### 4.4.1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar  $<0,001$  lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai t hitung sebesar 36,157 lebih besar dari t-tabel yakni 1,974 sehingga hipotesis pertama **H<sub>1</sub> diterima**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian daerah.

Hal tersebut sejalan dengan teori *Stewardship*, pemerintah daerah selaku *steward* yaitu pelaku utama roda pemerintahan utamanya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai kepentingan bersama yaitu mensejahterakan masyarakat. Pendapatan

Asli Daerah sebagai hasil pengelolaan sumber daya secara sendiri akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhannya sendiri.

Kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat dikatakan sebagai kemandirian daerah. Kemandirian daerah diukur melalui rasio kemandirian daerah, yang dapat dilihat melalui proporsi PAD terhadap total dana transfer yang diberikan ke daerah. Selain itu, teori *stewardship* juga menekankan pentingnya orientasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki setiap daerah secara mandiri sehingga ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat semakin berkurang.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada variabel PAD nilai tertinggi dimiliki Kota Semarang sebesar 0,53 sebanding dengan nilai tertinggi pada variabel rasio kemandirian daerah sebesar 1,46 yang diperoleh oleh Kota Semarang di tahun yang sama. Pemerintah Kota Semarang sebagai Kota di Provinsi Jawa Tengah berhasil memperoleh tingkat kemandirian tertinggi pada tahun 2019 sampai 2023 dengan perolehan rata-rata rasio sebesar 127,29%. Tingginya tingkat kemandirian ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mampu dalam melakukan pengelolaan daerahnya utamanya pada keuangan APBD. Oleh karena itu, semakin tinggi PAD yang dihasilkan daerah dapat meningkatkan kemandirian daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2023), Mahardika & Fauzan (2022), Rivandi & Anggraini (2022), Setiawan et al. (2021), Fitriyani & Suwarno (2021), Machfud et al. (2021), Malau & Simarmata

(2020), Haryanto & N (2019) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah.

#### **4.4.2. Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap rasio kemandirian daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar  $<0,001$  lebih kecil dari taraf signifikansi  $0,05$  dan nilai  $t$  hitung menunjukkan negatif sebesar  $15,435$  lebih kecil dari  $t$ -tabel yakni  $-1,974$  sehingga hipotesis kedua **H<sub>2</sub> diterima**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap rasio kemandirian daerah.

Penerapan teori desentralisasi fiskal sesuai dengan tujuan pemberian dana Transfer ke Daerah yaitu untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah dalam mendanai kebutuhan daerah. Namun, dengan transfer dana menimbulkan efek negatif seperti berkurangnya motivasi daerah untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Dengan keberadaan transfer ke daerah yang terlalu besar dapat menyebabkan pemerintahan daerah cenderung tidak mandiri untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya dana transfer yang cukup dapat membuat pemerintah daerah merasa tidak perlu berusaha keras untuk meningkatkan PAD. Kedua, ketergantungan pada dana transfer dapat menciptakan daerah terus-menerus mengharapkan dana transfer dari pusat sehingga menjadi kurang inovatif dalam mencari sumber pendapatannya sendiri. Kondisi tersebut dinamakan *flypaper effect*. *Flypaper effect* merupakan keadaan yang menimbulkan pemerintah daerah lebih besar merespon terhadap transfer ke daerah untuk

membayai kebutuhan daerah daripada meningkatkan PAD sendiri (Ardanareswari et al, 2019).

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada variabel Transfer ke Daerah dengan rata-rata sebesar 0,6081 menunjukkan ketergantungan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai 2023 sangat tinggi melebihi nilai persentase 50% (Resca, Y & Munandar, A, 2023). Hasil ini sejalan dengan penelitian Ardanareswari et al (2019) dan Mahardika & Fauzan (2022) yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemandirian daerah yang rendah karena masih besarnya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian yang rendah dapat dilihat pada fenomena selama tahun 2019 sampai 2023, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai rasio kemandirian rata-rata sebesar 29,53%; 31,46%; 36,57%; 34,45%; 34,88%. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil statistik deskriptif pada variabel rasio kemandirian daerah (KKD). Untuk nilai rata-rata (*mean*) didapatkan nilai sebesar 0,3344 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan di Pemerintah Jawa Tengah masih rendah sehingga masih ada campur tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin tinggi transfer ke daerah yang diterima daerah dari pemerintah pusat dapat menurunkan kemandirian daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2023), Mahardika & Fauzan (2022), Fitriyani & Suwarno (2021), Machfud et al. (2021), Ariani & Putri (2016) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian daerah

#### **4.4.3. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Rasio Kemandirian Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,022 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,318 lebih besar dari t-tabel yakni 1,974 sehingga hipotesis pertama

#### **H<sub>3</sub> diterima**

Hal tersebut sejalan dengan teori *Stewardship*, pemerintah daerah menjalankan tugasnya didasarkan untuk memenuhi kepentingan bersama. Besaran porsi belanja modal dianggarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum. Penyediaan fasilitas umum berupa meningkatkan maupun perbaikan aset infrastruktur dapat memberikan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah baik berupa pajak maupun retribusi daerah (Andriana, 2020).

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatannya dengan mengalokasikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk mengembangkan sektor-sektor produktif. Alokasi belanja ini bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal. Pembangunan infrastruktur industri memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pajak daerah (Wong, 2004).

Pada hasil statistik deskriptif, variabel belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sampai 2023 memiliki rata-rata sebesar 13,5%. Persentase ini sudah memenuhi bobot alokasi porsi belanja daerah untuk

pembiayaan investasi dalam bentuk belanja modal. Selain itu, hasil uji statistik t menunjukkan besarnya kontribusi belanja modal mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 3,8% sedangkan 96,2% dipengaruhi variabel lain dalam model regresi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap kemandirian daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2022), Andriana (2020), Ariani & Putri (2016) yang menemukan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Dana Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya ketergantungan suatu daerah terhadap penerimaan dana transfer ke daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan alokasi pada belanja modal suatu daerah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang berefek pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu mempengaruhi tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan, maka implikasi yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

### 1) Bagi Penelitian Selanjutnya

- (1) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas penelitiannya dengan mengambil objek penelitian di pemerintah daerah lain.
- (2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kemandirian daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Variabel tersebut merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat diketahui seberapa besar proporsi dari ketiga variabel dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

### 2) Bagi Pemerintah

- (1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai dasar bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum terkelola dengan optimal serta memanfaatkan dana dari pemerintah pusat untuk penyediaan aset infrastruktur yang mampu meningkatkan pembangunan daerah.
- (2) Bagi OPD Pemerintah, penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah serta bagi Organisasi

Perangkat Daerah yang melakukan pengeluaran belanja terkhusus belanja modal dapat memaksimalkan produktivitas dan sehingga prestasi kerja meningkat pada Pemerintah Daerah.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menemukan keterbatasan, yakni fokus sampel dalam penelitian ini hanya menguji kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tidak menguji kabupaten dan kota Provinsi lainnya sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi karena ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian masih terlalu sempit.

### **5.4. Agenda Penelitian Mendatang**

Hasil penelitian ini dan keterbatasan yang telah ditemukan dalam penelitian dapat dijadikan sumber ide bagi penelitian selanjutnya, yakni diperlukan perbandingan data dari sumber lain seperti PPID Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui *website* <https://e-ppid.bpk.go.id/> untuk memastikan data aktual dan relevan. Selain itu, penulis juga menyarankan peneliti selanjutnya untuk menggunakan objek penelitian pemerintah daerah lain untuk memperkaya penelitian kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Ardiansyah, R. (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 4(1), 92–106. <https://doi.org/10.32815/jpro.v4i1.1707>
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=khyEHAsAAAAJ&citation\\_for\\_view=khyEHAsAAAAJ:u5HHmVD\\_uO8C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=khyEHAsAAAAJ&citation_for_view=khyEHAsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C)
- Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15, 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 1(1), 61–69. <https://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/228>
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.126>
- Haryanto, H., & N, A. F. A. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25545>
- Hasibuan, N. F. G., & Tiara, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(2), 127–140. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i2.7771>
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>

- Mahardika, E. P., & Fauzan. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *EQIEN - Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 407–416. <https://stiemituttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/746/523>
- Malau, E., & Simarmata, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3, 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>
- Nurjana, D., & Pasaribu, V. L. D. (2023). Pengaruh Derajat Kontribusi PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Modal Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten). *Jurnal Sekuritas*, 6(2), 109–121. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKT/article/view/23166/13803>
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah*
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2018). Analisis kemandirian keuangan daerah. *INOVASI*, 13(2), 92. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2461>
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021. *Jurnal*

*Inovasi Penelitian*, 3(2), 6831–6842. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2166/1680>

- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem InformasI*, 3(1), 298–314. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2143>
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *PROSIDING BIEMA*, 2, 51–64. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1680>
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1), 44–53. <https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36. <https://doi.org/10.35837/subs.v5i1.1382>
- Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.26-36>
- Yahya, M., & Diah Widajantie, T. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(4), 317–325. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i4.177>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics								
	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean		Std. Deviation Statistic	Kurtosis	
				Statistic	Std. Error		Statistic	Std. Error
PAD	175	.10	.53	.1959	.00555	.07341	6.036	.365
TKD	175	.36	.78	.6081	.00389	.05151	9.250	.365
BM	175	.05	.27	.1351	.00313	.04136	.473	.365
KKD	175	.16	1.46	.3344	.01424	.18836	18.351	.365
Valid N (listwise)	175							

Sumber: *Output SPSS, 2024*

### Lampiran 2 : Uji Normalitas

#### Lampiran 2.1 : Uji Kolmogorov-Smirnov

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		175	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.05439989	
Most Extreme Differences	Absolute	.066	
	Positive	.066	
	Negative	-.031	
Test Statistic		.066	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.062	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.063	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.057
		Upper Bound	.070

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2110151063.

Sumber: *Output SPSS, 2024*

## Lampiran 2.2 : Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	PAD	.552	1.812
	TKD	.599	1.669
	BM	.900	1.111

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: *Output SPSS, 2024*

## Lampiran 2.3 : Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.097	.011		9.058	<.001
	PAD	-1.011E-5	.000	-.016	-.211	.833
	TKD	.000	.001	-.018	-.231	.817
	BM	1.122E-5	.000	.055	.721	.472

a. Dependent Variable: ABS\_GLET

Sumber: *Output SPSS, 2024*

## Lampiran 2.4 : Uji Autokorelasi

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00511
Cases < Test Value	87
Cases >= Test Value	88
Total Cases	175
Number of Runs	84
Z	-.682
Asymp. Sig. (2-tailed)	.495

a. Median

Sumber: *Output SPSS, 2024*

### Lampiran 3 : Uji Goodness of Fit

#### Lampiran 3.1 : Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 <sup>a</sup>	.960	.959	.03814

a. Predictors: (Constant), BM, TKD, PAD

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: *Output SPSS, 2024*

#### Lampiran 3.2 : Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

##### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.925	3	1.975	1357.587	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	.249	171	.001		
	Total	6.173	174			

a. Dependent Variable: KKD

b. Predictors: (Constant), BM, TKD, PAD

Sumber: *Output SPSS, 2024*

### Lampiran 4 : Uji Hipotesis

#### Lampiran 4.1 : Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.617	.051		12.170	<.001
	PAD	1.919	.053	.748	36.192	<.001
	TKD	-1.120	.073	-.306	-15.443	<.001
	BM	.171	.074	.038	2.318	.022

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: *Output SPSS, 2024*

